

Daftar Pustaka

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 7 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep- 15A/Men/ 1994.

Putusan

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yurisprudensi 1/Yur/PHI/2018 (2018).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae840a5d4f2d0a88f313533383134.html>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg (2022).

Buku

Ike Farida. *Perjanjian Perburuhan Peranjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*. Bengkulu : Mandar Maju. 2010.

M.Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.

Tuti Rastuti. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.

Ugo, and Pujiyo. *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jurnal

A Khakim. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. 5th ed. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020.

Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Burhanudin, Muhammad. "Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/PDT.G/2011/PTA.BDG. Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil." *Adliya* 9, no. 1 (2015): 23–56.

Charda S., Ujang. "Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja." *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.86>.

Fakhriah, Efa Laela. "Perkembangan alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata

- di pengadilan menuju pembaruan hukum acara perdata." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015): 135-153.
- Hana Dwi Prasasti. "ANALISIS PUTUSAN NO.20/PDT.SUS-PHI/G/2014/PN.SMG TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KECELAKAAN KERJA." Universitas Semarang, 2018.
- Humas/Hamdi. "Kewenangan MK Untuk Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara." *mkri.id*. Accessed January 12, 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17729&menu=2#:~:text=Hak konstitusional berupa hak untuk,hak perempuan dan hak anak>.
- Kumala, Melinda Putri. "Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubit Probatio." *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 06, no. 02 (2021): 272-78.
- Nugraha, Helmy Abi. "Pembuktian Dalam Hukum Perdata." *Djkn.Kemenkeu.Go.Id*, 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-batam/baca-artikel/16467/Pembuktian-dalam-Hukum-Perdata.html#:~:text=Pembuktian dalam hukum perdata adalah,satu pihak dalam perkara perdata>.
- Rahmat Ramadhan. "A. Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum PHK Yang Terjadinya Dengan Sendirinya Karena Hukum. Pasal 1603 KUHPerdata Menjelaskan Bahwa Hubungan Kerja Berakhir Demi Hukum Jika Abis Waktunya Yang Di Tetapkan Dalam Perjanjian Dan Dalam Peraturan Undang-Undang At." Universitas Islam Riau, 2022. <https://repository.uir.ac.id/17361/1/181010724.pdf>.
- Supono. "Menuju Pengadtlan Hubungan Industrial (Phi)Yang Cepat, Tepat, Adil Dan Murah." *Kajian* 19, no. 2 (2014): 107-26.
- Syah, Elgi Hikmat, and Imam Budi Santoso. "Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Pt. Sumber Alfaria Trijaya Berdasarkan Putusan No. 155/Pdt.Sus-Phi/2021/Pn.Bdg." *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 4 (2022): 1730-43. <http://jurnal.um->

- tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/5295.
- Universitas Lampung. "BAB II," n.d., 18. [https://digilib.unila.ac.id/2789/12/BAB II.pdf](https://digilib.unila.ac.id/2789/12/BAB%20II.pdf).
- Ussu, Darliyanti. "Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata." *Lex Privatum* 2, no. 1 (2014): 127–33.
- Viera Valencia, Luis Felipe, and Dubian Garcia Giraldo. "PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK ANTARA PT. INECDA KEBUN SEBERIDA DENGAN TENAGA KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2 (2019): 1–15.
- Wahyudi, Muhammad Robi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana." *Universitas Muhammadiyah Metro*, 2021, 1. <http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/486>.

Internet

- Abd. Rasyid As'ad. "Metode Dan Teknik Penyusunan Putusan." badilag.mahkamahagung.go.id, 2024. <https://www.badilag.net>.
- Curhat Hukum Ismail Marzuki. "EPS 29: Cuti Tahunan 'Diuangkan.'" Indonesia: You Tube, 2022. <https://youtu.be/e7yYKLgjOVc?si=LTiZ51vz4mZb50Yg>.
- Humas/Hamdi. "Kewenangan MK Untuk Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara." mkri.id, 2021. [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17729&menu=2#:~:text=Hak konstitusional berupa hak untuk,hak perempuan dan hak anak](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17729&menu=2#:~:text=Hak%20konstitusional%20berupa%20hak%20untuk,hak%20perempuan%20dan%20hak%20anak).
- Nugraha, Helmy Abi. "Pembuktian Dalam Hukum Perdata." *Djkn.Kemenkeu.Go.Id*, 2023. [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-batam/baca-artikel/16467/Pembuktian-dalam-Hukum-Perdata.html#:~:text=Pembuktian dalam hukum perdata adalah,satu pihak dalam perkara perdata](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-batam/baca-artikel/16467/Pembuktian-dalam-Hukum-Perdata.html#:~:text=Pembuktian%20dalam%20hukum%20perdata%20adalah,satu%20pihak%20dalam%20perkara%20perdata).

Tim hukumonline. “6 Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata.”

Hukumonline.Com,

2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-pembuktian-hukum-acara-perdata-lt6433b5e539383/>.

Tim Hukumonline. “Pengertian Konstitusi, Tujuan, Fungsi, Dan Praktiknya.”

hukumonline.com,

2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-konstitusi--tujuan--fungsi--dan-praktiknya-lt62a73bec64e6b/?page=all>.